

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099174/2018**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (005) | MAHKAMAH AGUNG |
| 2. Unit Organisasi | : (03) | DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM |
| 3. Provinsi | : (06) | ACEH |
| 4. Kode>Nama Satker | : (099174) | PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON |
| Sebesar | : Rp. | 188.606.000 (SERATUS DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS ENAM RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	188.606.000
005.03.07.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	188.606.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	188.606.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN LHOKSEUMAWE	(089) Rp.	188.606.000
---------------------	-----------	-------------

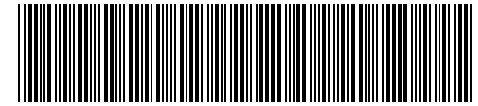
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Jakarta, 05 Desember 2017
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099174/2018
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:2000-5417-7331-6731

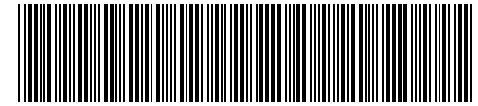
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (06) ACEH
Kode>Nama Satker : (099174) PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON

Kuasa Pengguna Anggaran : JAMALIAH
Bendahara Pengeluaran : KHAIRULLAH
Pejabat Penanda Tangan SPM : JAMALIAH

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		188.606.000
Sub Fungsi	03.04	PERADILAN		188.606.000
2 Program	005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		188.606.000
Sasaran Program	01	Terselesainya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum		
Indikator Kinerja Program	01	Terselenggaranya penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	124091 Perkara	
	02	Terselenggaranya pelaksanaan pelayanan peradilan umum	106767 Jam Layanan	
	03	Terselenggaranya pembinaan tenaga teknis peradilan umum	2000 Orang	
	04	Terselenggaranya Tata Laksana Perkara Kasasi, PK dan Grasi	80 Orang	
Output Program	01	Putusan Perkara Pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding Tepat Waktu di Peradilan Umum		
Indikator Output Program	01	Perkara Pidana di Tingkat Pertama dan Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu	142485 Perkara	
	02	Perkara Perdata di Tingkat Pertama dan Banding Yang Diselesaikan Tepat Waktu	54482 Perkara	
	03	Jam Layanan Pos Bantuan Hukum	95600 Jam Layanan	
	04	Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan	55665 Perkara	
	05	Perkara PHI Yang Diselesaikan Tepat Waktu	700 Perkara	
	06	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	2000 Perkara	
Kegiatan	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		188.606.000
Sasaran Kegiatan	01	Terselenggaranya Tertib administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Umum		
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Layanan dukungan penyelesaian perkara peradilan umum		
	02	Pos bantuan hukum		
	03	perkara peradilan yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung		
	04	perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu		
	05	Perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara		
Output Kegiatan	1049.003	Layanan Pos Bantuan Hukum	384,00 Jam Layanan	38.400.000
Indikator Output Kegiatan	01	Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum	108675 Jam Layanan	
Output Kegiatan	1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	220,00 Perkara	148.016.000
Indikator Output Kegiatan	01	Penyelesaian Perkara Pidana ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu	- Perkara	
	02	Pembinaan dan Pemeriksaan	- Satker	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099174/2018
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:2000-5417-7331-6731

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (06) ACEH
Kode>Nama Satker : (099174) PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON

Kuasa Pengguna Anggaran : JAMALIAH
Bendahara Pengeluaran : KHAIRULLAH
Pejabat Penanda Tangan SPM : JAMALIAH

Halaman : IA.2

Indikator Output Kegiatan	03	Honor Operator SAI/BMN Tingkat Korwil	- Orang	
Output Kegiatan	1049.006	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	3,00 Perkara	2.190.000
Indikator Output Kegiatan	01	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	873,00 Perkara	

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Badilum

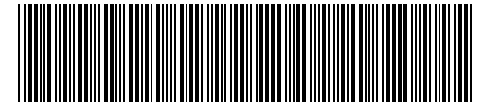
ttd.
Dr. Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR : DIPA- 005.03.2.099174/2018

I B. SUMBER DANA



DS:2000-5417-7331-6731

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 Provinsi : (06) ACEH
 Kode>Nama Satker : (099174) PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON

Halaman : I B. 1

					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2018	Rp.	188.606.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	188.606.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099174/2018
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2000-5417-7331-6731

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (06) ACEH
Kode>Nama Satker : (099174) PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
099174	PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON	-	188.606	-	-	-	188.606		
005.03.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	188.606	-	-	-	188.606		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	188.606	-	-	-	188.606		
1049.003	Layanan Pos Bantuan Hukum	-	38.400	-	-	-	38.400	06 . 03	
01	RM	-	38.400	-	-	-	38.400	089	
1049.005	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang Tepat Waktu	-	148.016	-	-	-	148.016	06 . 03	
01	RM	-	148.016	-	-	-	148.016	089	
1049.006	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	-	2.190	-	-	-	2.190	06 . 03	
01	RM	-	2.190	-	-	-	2.190	089	
JUMLAH		-	188.606	-	-	-	188.606		

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Dr. Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099174/2018
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2000-5417-7331-6731

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : (06) ACEH
Kode>Nama Satker : (099174) PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	099174	PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON													
		RENCANA PENARIKAN DANA	15.716	15.710	15.710	15.710	15.710	15.710	20.911	15.088	12.686	12.946	14.493	18.216	188.606
		52 BELANJA BARANG	15.716	15.710	15.710	15.710	15.710	15.710	20.911	15.088	12.686	12.946	14.493	18.216	188.606
	005.03.07.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	15.716	15.710	15.710	15.710	15.710	15.710	20.911	15.088	12.686	12.946	14.493	18.216	188.606
		52 BELANJA BARANG	15.716	15.710	15.710	15.710	15.710	15.710	20.911	15.088	12.686	12.946	14.493	18.216	188.606
		PERKIRAAN PENERIMAAN	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145	1.141	13.736
		- PNPB (425231)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	45
		- PNPB (425232)	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	386	4.698
		- PNPB (425233)	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	561	6.710
		- PNPB (425239)	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	193	2.283

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Dr. Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099174/2018
IV A. B L O K I R**



DS:2000-5417-7331-6731

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : [06] ACEH
Kode dan Nama Satker : [099174] PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Dr. Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099174/2018
IV B. C A T A T A N**



DS:2000-5417-7331-6731

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Provinsi : [06] ACEH
Kode dan Nama Satker : [099174] PENGADILAN NEGERI LHOK SUKON

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Badilum

ttd.
Dr. Herri Swantoro, SH, MH
195909041984031004